

HUKUM.

KOLEKSI KHUSUS
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

02

21/09
er/89

Laporan Penelitian

NO : 002/PP. UA / SPP / 10 / 1989.

Dana SPP / DPP

56

INSPEKTORAT WILAYAH KOTAMADYA DAN PERANANNYA
DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI KOTAMADYA
PADANG PANJANG

OLEH :

SRI ARNETTI, SH



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PUSAT PENELITIAN
PADANG
1989

B A B I.
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Inspektorat Wilayah Kota adalah suatu badan yang ada di daerah Tingkat II yang tugas dan fungsinya adalah membantu kepala daerah dalam bidang pengawasan dan pemeriksaan.

Dan kalau kita perhatikan tugas dan fungsi dari Inspektorat Wilayah kotamadya (Itwilko) ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menjamin kelancaran tugas-tugas aparat pemerintah di daerah dan menghindari terjadinya bermacam-macam pelanggaran dan penyelewengan terhadap tugas-tugas tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas inilah maka timbul pemikiran bagi peneliti untuk mengadakan suatu penelitian yang khusus melihat dari dekat bagaimana betul peranan dari Inspektorat Wilayah kota tersebut dalam menunjang pembangunan yang sedang kita galakkan sekarang ini. Khusus mengenai ini peneliti mengambil lokasi penelitian pada Daerah tingkat II Padang Panjang, yakni dengan judul:

" ITWILKO DAN PERANANNYA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN di KOTA MADYA PADANG PANJANG."

Disini peneliti akan mengadakan penelitian yang lebih menfokuskan pada peranan Itwilko itu sendiri dalam menunjang pembangunan dengan dasar yang sesuai dengan yang ditentukan oleh UU atau peraturan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Itwilko itu sendiri.

Sebagai dasar hukum dari pada tugas dan fungsi dari Itwilko ini adalah :

- Keputusan Menteri Dalam Negeri NO 220, tahun 1979 ten-

tang :

Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi, Tata kerja Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri NO 5, tahun 1975 tentang :
Cara pengawasan Umum atas jalannya pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas departemen Dalam Negeri.
- Undang-Undang No 5 tahun 1974 tentang :
Pokok-pokok pemerintahan di daerah.

B. IDENTIFIKASI MASALAH.

Sesuai dengan judul penelitian yang peneliti lakukan yaitu dengan judul, " Inspektorat Wilayah Kota dan Peranannya dalam menunjang pembangunan di kotamadya Padang Panjang", agar lebih mengarah kepada sasaran dan tujuan yang hendak dicapai maka disini peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui lebih dekat apa betul yang menjadi tugas badan tersebut di daerah dan sampai di mana pula wewenang dan tugasnya.
2. Dengan instansi/Dinas apa saja badan ini terkait dalam melaksanakan tugasnya di daerah tingkat II, khusus di Kotamadya Padang Panjang.
3. Untuk mengetahui bagaimana betul peranan Inspektorat Wilayah Kota ini dalam menunjang pembangunan khususnya di Kotamadya Padang Panjang.

C. METODE PENELITIAN.

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian yang bersifat diskriptif dengan metode pendekatan secara yuridis, sosiologis dan analisis.

- Pendekatan / penelitian ini dikatakan bersifat diskriptif

B A B IV

HASIL PENEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan membahas dan menesukan - hasil penelitian selama melakukan penelitian dengan judul "It-wilko dan Perannya Dalam Menunjang Pembangunan di Kotamadya Padang Panjang" sebagaimana uraian berikutnya ini :

A. LOKASI PENELITIAN.

Sebagaimana judul penelitian ini maka lokasi penelitian yang peneliti lakukan adalah di Kantor Inspektorat Wilayah Kotamadya Padang Panjang yang terletak di Jalan St. Syahrir No. 90 Padang Panjang (tepatnya di Kecamatan Padang-Panjang Barat pada Kelurahan Silaing Bawah). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Kantor Inspektorat Wilayah Kotamadya Padang Panjang tidak mempunyai Gedung yang berdiri - sendiri akan tetapi berada pada lingkungan Kantor Walikota madya Daerah Tingkat II Padang Panjang.

Menurut semestinya kantornya harus berdiri sendiri dan terpisah dengan Dinas-dinas yang akan diperiksanya. Namun-sampai saat penulisan laporan ini masih belum ada tanda-tanda akan dibangunnya Gedung Inspektorat Wilayah Kotamadya Padang Panjang.

B. IDENTITAS RESPONDEN.

Identitas Responden adalah sangat penting sekali guna untuk menentukan apakah data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipercaya akan kebenarannya. Jadi dengan mengetahui identitas responden maka penelitian ini akan dapat memperoleh data yang benar-benar dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan.

Untuk ini peneliti akan menjelaskan Identitas Respon-

B A B V

P E N U T U P

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Inspektorat Wilayah Kotamadya Padang Panjang dan Perannya dalam menunjang Pembangunan di Kotamadya Padang Panjang, dimana sesuai dengan hasil yang peneliti lakukan dilapangan baik itu data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dari hasil pengamatan peneliti sendiri maka peneliti disini dapat mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Bahwa hipotesis yang peneliti kemukakan adalah benar yaitu bahwa Inspektorat Wilayah Kotamadya mempunyai peranan terhadap pembangunan di kotamadya Padang Panjang.
2. Inspektorat Wilayah Kotamadya adalah aparat yang membantu pemerintah di daerah tingkat II dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan.
3. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kotamadya adalah pengawasan umum sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1975.
4. Tidak semua dinas yang ada di daerah Tingkat II dapat dilakukan pengawasan atau pemeriksaan oleh Inspektorat Wilayah Kotamadya khususnya Inspektorat Wilayah Kotamadya Padang Panjang.
5. Terhadap pembangunan di Kotamadya Padang Panjang keberadaan Inspektorat adalah sebagai alat pengontrol bagi dinas-dinas yang ada dalam menjalankan tugas pemerintah.
6. Peranan Inspektorat Wilayah Kotamadya khususnya di Kotamadya Padang Panjang akan lebih terasa adalah dalam hal menanggulangi terjadinya baik itu berupa kelalaian

ataupun penyelewengan -penyelewengan dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Sesuai dengan latar belakang pemikiran untuk melakukan penelitian ini dimana sekarang sedang giat-giatnya di laksanakan pengawasan apakah dipusat maupun didaerah. Dari itu setelah peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, juga peneliti akan mengemukakan beberapa saran yang berhubungan dengan peranan Inspektorat Wilayah Kotamadya Padang Panjang antara lain :

1. Agar Inspektorat Wilayah Kotamadya khususnya di Kotamadya Padang Panjang dapat berperan secara optimal dalam menunjang pembangunan yang sedang berjalan hendaknya aparat Inspektorat di Kotamadya Padang Panjang ditambah jumlahnya dan betul-betul orang yang ahli dalam melakukan pemeriksaan dan pengaduan.
2. Juga dianjurkan agar dana yang disediakan untuk Inspektorat Wilayah Kotamadya Padang Panjang hendaknya untuk tahun anggaran yang akan datang lebih ditingkatkan lagi mengingat banyaknya dinas-dinas atau instansi yang akan diperiksa.
3. Agar peranan Inspektorat Wilayah Kotamadya betul tempat dalam menunjang pembangunan hendaknya semua instansi yang diperiksa betul-betul dapat mengerti hak akan tugas aparat tersebut dengan arti kata agar setiap instansi yang diperiksa hendaknya jujur dan terbuka kalau diadakan pemeriksaan.
4. Untuk menjaga wibawa dari aparat Inspektorat tersebut maka disarankan juga pada pemerintah daerah agar dibangun gedung secara tersendiri mengingat tugas-badan ini penuh kerahasiaan.

Begitulah beberapa kesimpulan dan saran yang dapat peneliti kemukakan sesuai dengan hasil yang diperoleh selama melakukan penelitian ini.

Semoga laporan penelitian ini berguna serta ada manfaatnya - bagi kita semua, khususnya bagi praktisi Hukum Tata Negara.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Departemen Dalam Negeri, Inspektorat Wilayah Propinsi/Kabupaten/Kotamadya, Jakarta 1982.
2. Departemen Dalam Negeri, Buku Pedoman Pemeriksaan Khusus Sehubungan berakhirnya masa jabatan Pemrintah Daerah, Jakarta, 1982.
3. Departemen Dalam Negeri, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 1981.
4. Departemen Dalam Negeri, Buku Pedoman Pengawasan Umum di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 1981.
5. Sujanto, Drs, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia, Indonesia, 1983.
6. Sujanto, Drs, Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen, Penerbit Miar, Jakarta, 1983.
7. Sarwoto, Drs, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, Chalia Indonesia, Jakarta, 1987.

KOLEKSI KHUSUS

PUSAT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AN